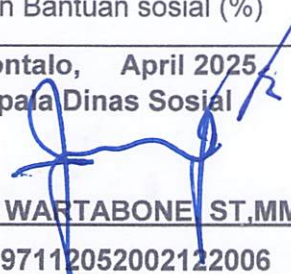
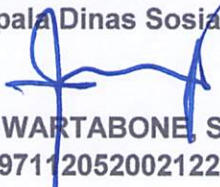


PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	
Sumber Data	RPD 2023-2026	
Tujuan Strategis RPD	1. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	
	2. Peningkatan sumber daya manusia	
	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	
	4. Terwujudnya good and clean government	
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	
Nama Dinas Terkait	1. Bappeda	
	2. Dinas Koperindag	
	3. Dinas P2PA	
	4. Dinas Pangan	
	5. Dinas PU	
	6. Dinas Sosial	
Sasaran RPD	Sasaran 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	
	Sasaran 2. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian	
	Sasaran 3. Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	
	Sasaran 4. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
	Sasaran 5. Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	
IKU Sasaran RPD	1. Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	
	2. Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	2. Program Pemberdayaan Sosial	
	3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
	4. Program Rehabilitasi Sosial	
	5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
	6. Program Penanganan Bencana	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : 1. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sasaran Strategis : 1. Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat IKU : 1. Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	
		2. Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)
		Gorontalo, April 2025 Kepala Dinas Sosial  SAGITA WARTABONE ST,MM Nip. 197112052002122006

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Provinsi Gorontalo		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: RPD 2023-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial		
Sumber Data	Renstra Dinas Sosial 2023-2026		
Tujuan Strategis	1. Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat		
	2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat		
	2. Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD.		
IKU Renstra OPD		IKU	2025
	1	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	12%
	2	Nilai SAKIP	A
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : 1. Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat IKU : 1. Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial		
		Gorontalo, April 2025 Kepala Dinas Sosial  SAGITA WARTABONE ST,MM NIP. 197112052002122006	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Provinsi Gorontalo : 2025 : RPD 2023 - 2026 : Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Dinas Sosial	
Sumber Data	Renja Dinas Sosial 2025	
Tujuan Strategis	Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat	
Program Dinas Sosial Tahun 2025 dan Kegiatan Utama	1. Program Pemberdayaan Sosial a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
	2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
	3. Program Rehabilitasi Sosial a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti d. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
	4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial a. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
	5. Program Penanganan Bencana a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
	6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Jumlah rekomendasi UGB dan PUG	12 rekomendasi
	2. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya	77 orang
	3. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya	25 orang
	4. Jumlah pekerja migran Korban Tindak Kekerasan yang dilayani	10 orang
	5. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	10 orang
	6. Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	30 Orang
	7. Jumlah Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	23 orang
	8. Jumlah dokumen rehabilitasi sosial PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	1 dok
	9. Jumlah rekomendasi pengangkatan anak antar WNI	20 rekomendasi
	10. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9.000 KPM
	11. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	145 org
	12. Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	6 org
	13. Jumlah warga negara korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.400 org
	14. Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola	2 Lokasi
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	1 Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial a. Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Indikator keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9.000 KPM
	2 Program : Pemberdayaan Sosial a. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator keluaran : Jumlah rekomendasi UGB dan PUG	12 Rekomendasi
Gorontalo, April 2025 Kepala Dinas Sosial SAGITA WARTABONE, ST,MM NIP. 197112052002122006		

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Provinsi Gorontalo
Nama OPD	: Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: RPD 2023 - 2026
Tujuan Strategis	: Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Wajib Bidang Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan : Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat									
	Sasaran : Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	Terdistribusinya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah dan tidak sesuai spesifikasi.	RSO.25.06.01.14	Dinas Sosial/Bidang Linjamsos	Proses pengawasan pengadaan dan distribusi paket bantuan sosial yang tidak terkontrol	Internal	C	1. Masyarakat menerima bantuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi	Dinas Sosial dan Masyarakat
									2. Secara hukum pejabat pembuat komitmen akan memperoleh gugatan baik dari LSM maupun dari pihak penegak hukum	
			Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB yang beredar dimasyarakat dilakukan tanpa adanya ijin ataupun rekomendasi dari pemerintah yang berwenang	RSO.25.06.01.14	Dinas Sosial/Bidang Dayasos	Kurangnya informasi terkait tata cara pengurusan izin Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di tengah masyarakat	Internal	C	Kurangnya pemasukan negara dari pajak atas hadiah untuk kesejahteraan masyarakat	Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

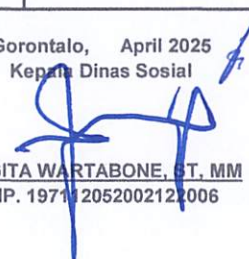
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Gorontalo, April 2025
Kepala Dinas Sosial


SAGITA WARTABONE, ST, MM
NIP. 197112052002122006

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Provinsi Gorontalo Nama OPD : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : RPD 2023-2026 Tujuan Strategis : Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat Sasaran strategis OPD : Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat Urusan Pemerintahan : Wajib Bidang Sosial OPD yang Dinilai : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan	Proses distribusi bantuan kepada masyarakat apabila tidak dilakukan pengawasan dan kontrol terhadap kualitas dan jumlah bantuan, maka akan berdampak bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah dicantumkan pada dokumen pengadaan barang	ROO.25.06.01.14	Dinas Sosial/Bidang Linjamsos	Tidak dilakukan pengawasan terhadap proses pemaketan barang	Eksternal	C	KPA tidak dapat melakukan pembayaran kepada penyedia jika barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak	KPA
							Tidak dilakukan pengecekan terhadap kualitas dan jumlah barang			Secara hukum KPA akan mendapatkan gugatan dan penegak hukum dan masyarakat	
2	Kegiatan : Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi UGB dan PUB	Pelaksanaan	Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB yang beredar dimasyarakat dilakukan tanpa adanya ijin ataupun rekomendasi dari pemerintah yang berwenang	ROO.25.06.01.14	Dinas Sosial/Bidang Pemberdayaan Sosial	Kurangnya informasi terkait tata cara pengurusan izin Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di tengah masyarakat	Internal	C	Kurangnya pemasukan negara dari pajak atas hadiah untuk kesejahteraan masyarakat	Masyarakat

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
 Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
 Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
 Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 Kolom f diisi dengan Kode risiko
 Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
 Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
 Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
 Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Gorontalo, April 2025
 Kepala Dinas

SAGITA WARTABONE, ST, MM
 NIP. 197112052002121006

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Provinsi				
Tahun Penilaian	: 2025				
Tujuan Strategis Pemda	: Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat				
Tujuan Strategis OPD	: Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				
Tujuan Operasional OPD	: Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat				
Urusan Pemerintahan	: Wajib				

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Strategis OPD 1:				
	Tersalurkannya bantuan sosial yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat jumlah	RSO.25.06.01.14	3	3	9
	Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB yang beredar dimasyarakat dilakukan tanpa adanya ijin ataupun rekomendasi dari pemerintah yang berwenang	RSO.25.06.01.14	3	3	9
III	Risiko Operasional OPD 1:				
	Proses distribusi bantuan kepada masyarakat apabila tidak dilakukan pengawasan dan kontrol terhadap kualitas dan jumlah bantuan, maka akan berdampak bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah dicantumkan pada dokumen pengadaan barang	ROO.25.06.01.14	3	3	9
	Proses Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB yang beredar dimasyarakat dilakukan tanpa adanya izin ataupun rekomendasi dari pemerintah yang berwenang	ROO.25.06.01.14	3	3	9

Gorontalo, April 2025
Kepala Dinas

SAGITA WARTABONE, ST, MM
NIP. 197112052002122015

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4					
	Kemungkinan kecil	3			ROO.25.06.01.14		
	Sangat jarang	2					
	Sangat jarang	1					
Keterangan :			Rendah	Risiko dapat diterima			
			Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya			
			Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas			

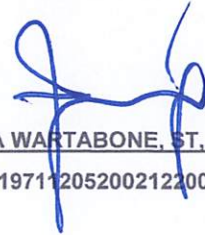
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Provinsi Gorontalo				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat				
Urusan Pemerintahan		: Wajib				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II Risiko Strategis OPD 1						
	Tersalurkannya bantuan sosial yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat jumlah	RSO.25.06.01.14	9	Kepala Dinas/Bidang Linjamsos	Proses pengawasan pengadaan dan distribusi paket bantuan sosial yang tidak terkontrol	Masyarakat menerima bantuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi
	Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB yang beredar dimasyarakat sudah memiliki ijin ataupun rekomendasi dari pemerintah yang berwenang	RSO.25.06.01.14	9	Kepala Dinas/Bidang Dayasos	Kurangnya informasi terkait tata cara pengurusan izin Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di tengah masyarakat	Kurangnya pemasukan negara dari pajak atas hadiah untuk kesejahteraan masyarakat
III Risiko Operasional OPD 1:						
	Proses distribusi bantuan kepada masyarakat apabila tidak dilakukan pengawasan dan kontrol terhadap kualitas dan jumlah bantuan, maka akan berdampak bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah dicantumkan pada dokumen pengadaan barang	ROO.25.06.01.14	9	Kepala Dinas/Bidang Linjamsos	Tidak dilakukan pengawasan terhadap proses pemaketan barang	KPA tidak dapat melakukan pembayaran kepada penyedia jika barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak
	Proses Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB yang beredar dimasyarakat dilakukan tanpa adanya izin ataupun rekomendasi dari pemerintah yang berwenang	ROO.25.06.01.14	9	Kepala Dinas/Bidang Dayasos	Kurangnya informasi terkait tata cara pengurusan izin Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di tengah masyarakat	Kurangnya pemasukan negara dari pajak atas hadiah untuk kesejahteraan masyarakat

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Gorontalo, April 2025
Kepala Dinas

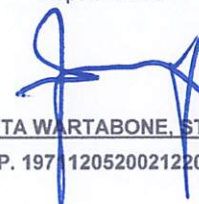

SAGITA WARTABONE, ST, MM
NIP. 197112052002122006

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	: Provinsi Gorontalo						
Tahun Penilaian	: 2025						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat						
Urusan Pemerintahan	: Wajib						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II Risiko Strategis							
	Tersalurkannya bantuan sosial yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat jumlah	RSO.25.06.01.14	SOP Penyaluran Bantuan Sosial	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Mengadakan kegiatan yang menyentuh masyarakat lapisan bawah	Kepala Dinas/Kepala Bidang Linjamsos	Triwulan II 2025
	Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB yang beredar dimasyarakat sudah memiliki ijin ataupun rekomendasi dari pemerintah yang berwenang	RSO.25.06.01.14	SOP Pengumpulan Uang dan atau Barang PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada	Sosialisasi terkait Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang melibatkan dunia usaha dan unsur Masyarakat	Kepala Dinas/Kepala Bidang Dayasos	Triwulan II 2025
III Risiko Operasional							
	Proses distribusi bantuan kepada masyarakat apabila tidak dilakukan pengawasan dan kontrol terhadap kualitas dan jumlah bantuan, maka akan berdampak bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah dicantumkan pada dokumen pengadaan barang	ROO.25.06.01.14	SOP Penyaluran Bantuan Sosial	Mengoptimalkan data yang ada untuk membantu penanganan fakir miskin	Mengadakan kegiatan yang menyentuh masyarakat lapisan bawah	Kepala Dinas/Kepala Bidang Linjamsos	Triwulan II 2025
	Proses Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB yang beredar dimasyarakat dilakukan tanpa adanya izin ataupun rekomendasi dari pemerintah yang berwenang	ROO.25.06.01.14	SOP Pengumpulan Uang dan atau Barang PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada	Sosialisasi terkait Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang melibatkan dunia usaha dan unsur Masyarakat	Kepala Dinas/Kepala Bidang Dayasos	Triwulan II 2025

Gorontalo, April 2025

Kepala Dinas



SAGITA WARTABONE, ST, MM

NIP. 19712052002122006

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Provinsi Gorontalo						
Tahun Penilaian	: 2025						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat						
Urusan Pemerintahan	: Wajib						

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	SOP Penyaluran Bantuan Sosial	Laporan Kegiatan	Dinas Sosial	Masyarakat	Triwulan II 2025		
2	Sosialisasi terkait Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang melibatkan dunia usaha dan unsur Masyarakat	Kegiatan Sosialisasi baik langsung maupun melalui media massa	Dinas Sosial	Dunia usaha, organisasi/lembaga dan masyarakat pada umumnya	Triwulan II 2025		
3	SOP Penyaluran Bantuan Sosial	Laporan Kegiatan	Dinas Sosial	Masyarakat	Triwulan II 2025		
4	Sosialisasi terkait Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang melibatkan dunia usaha dan unsur Masyarakat	Kegiatan Sosialisasi baik langsung maupun melalui media massa	Dinas Sosial	Dunia usaha, organisasi/lembaga dan masyarakat pada umumnya	Triwulan II 2025		

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

Gorontalo, April 2025
Kepala Dinas

SAGITA WARTABONE, ST, MM
NIP. 197112052002122006

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	: Provinsi Gorontalo
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis	: Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Wajib

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	SOP Penyaluran Bantuan Sosial	Laporan Kegiatan	Dinas Sosial	Triwulan II 2025		
2	Sosialisasi terkait Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang melibatkan dunia usaha dan unsur Masyarakat	Kegiatan Sosialisasi baik langsung maupun melalui media massa	Dinas Sosial	Triwulan II 2025		
3	SOP Penyaluran Bantuan Sosial	Laporan Kegiatan	Dinas Sosial	Triwulan II 2025		
4	Sosialisasi terkait Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang melibatkan dunia usaha dan unsur Masyarakat	Kegiatan Sosialisasi baik langsung maupun melalui media massa	Dinas Sosial	Triwulan II 2025		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

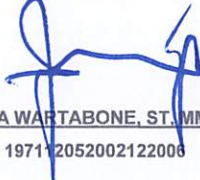
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

Gorontalo, April 2025

Kepala Dinas



SAGITA WARTABONE, ST, MM
NIP. 197112052002122008

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda		: Provinsi Gorontalo								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat								
Urusan Pemerintahan		: Wajib								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
II Risiko Strategis										
	Terselurkannya bantuan sosial yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat jumlah	RSO.25.06.01.14		Proses pengawasan pengadaan dan distribusi paket bantuan sosial yang tidak terkontrol	Masyarakat menerima bantuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi		Mengadakan kegiatan yang menyentuh masyarakat lapisan bawah	Triwulan II 2025		
	Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB yang beredar dimasyarakat sudah memiliki ijin ataupun rekomendasi dari pemerintah yang berwenang	RSO.25.06.01.14		Kurangnya informasi terkait tata cara pengurusan izin Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di tengah	Kurangnya pemasukan negara dari pajak atas hadiah untuk kesejahteraan masyarakat		Sosialisasi terkait Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang melibatkan dunia usaha dan unsur Masyarakat	Triwulan II 2025		
III Risiko Operasional										
	Proses distribusi bantuan kepada masyarakat apabila tidak dilakukan pengawasan dan kontrol terhadap kualitas dan jumlah bantuan, maka akan berdampak bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah dicantumkan pada dokumen pengadaan barang	ROO.25.06.01.14		Tidak dilakukan pengawasan terhadap proses pemaketan barang	KPA tidak dapat melakukan pembayaran kepada penyedia jika barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak		Mengadakan kegiatan yang menyentuh masyarakat lapisan bawah	Triwulan II 2025		
	Proses Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB yang beredar dimasyarakat dilakukan tanpa adanya izin ataupun rekomendasi dari pemerintah yang berwenang	ROO.25.06.01.14		Kurangnya informasi terkait tata cara pengurusan izin Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di tengah	Kurangnya pemasukan negara dari pajak atas hadiah untuk kesejahteraan masyarakat		Sosialisasi terkait Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang melibatkan dunia usaha dan unsur Masyarakat	Triwulan II 2025		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

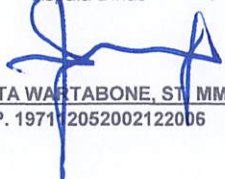
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Gorontalo, April 2025
Kepala Dinas

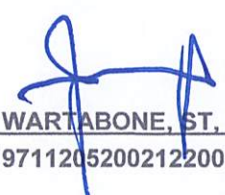

SAGITA WARTABONE, ST MM
NIP. 197112052002122006

**REGISTER RISIKO KECURANGAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2025**

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Nilai Risiko			Status Risiko	Uraian Dampak	Rencana Mitigasi
	Pelaksanaan Kegiatan : Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengumpul an Uang dan atau Barang (PUB) dan UGB tanpa izin ataupun rekomendasi	1. Dilapangan banyak ditemui pengumpulan sumbangan ilegal oleh oknum yang mengatasnamakan panitia pemba ngunan tempat ibadah. 2. Keengganan pelaku usaha untuk menyelang garakan undian gratis berhadiah	Kepala Bidang Pemberda yaan Sosial	1. Kurangnya informasi terkait tata cara peng-urusan izin Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di tengah masyarakat. 2. Pajak terkait penyelenggaraan undian gratis berhadiah dirasa kan menjadi beban bagi para pelaku usaha	1. Menyita surat surat izin pengum-pulan uang ilegal. 2.Melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha agar mau	3	3	9	tinggi	Masyarakat tidak mem per-oleh informasi dan kepastian atas penggunaan uang dari hasil pengumpulan sumbangan secara ilegal tersebut	1. Melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan pengurus takmirul mesjid serta lembaga kesejahteraan sosial yang akan melaksa nan pengum pulan uang dari masyarakat dan undian gratis berhadiah 2. Melakukan sosialisasi melalui media massa, leaflet , pamflet dll. 3. Meningkat kan pengawas an terhadap kegiatan pengumpulan uang dari masyarakat

Gorontalo, April 2025

Kepala Dinas


SAGITA WARTABONE, ST, MM

NIP. 197112052002122006